

TAJUK

## BI Tetap Dukung Pemulihan

Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan. Dukungan bank sentral itu ditunjukkan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Bank sentral telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam jumlah yang besar. Pada 2020, BI telah membeli SBN sebesar Rp 473,4 triliun. Sepanjang 2021, BI mencatat telah melakukan pembelian SBN sebesar Rp 143,3 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan Rp 215 triliun untuk penanganan di bidang kesehatan dan kemanusiaan berdasarkan SKB III. Sementara, pada 2022, BI akan kembali membeli SBN sebesar Rp 224 triliun dengan suku bunga rendah untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Pembelian SBN adalah bentuk sinergi stimulus fiskal dan moneter, mengingat defisit APBN 2022 akan mencapai 4,9% dari produk domestik bruto (PDB). Belanja negara pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp 2.714,2 triliun yang di antaranya untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur, sehingga membutuhkan pembiayaan senilai Rp 868 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo berharap ekonomi Indonesia bisa pulih lebih kuat di tahun 2022. Dengan berbagai sinergi antarpemangku kebijakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,7-5,5% pada tahun 2022, lebih tinggi dari tahun ini yang diperkirakan 3,4-4,0%.

Kinerja pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang akan bangkit didorong oleh sinergi dan koordinasi yang erat semua pihak untuk bertahan dan bangkit dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi juga akan disokong oleh perbaikan ekonomi global. Hal ini akan berdampak pada kinerja ekspor yang melanjutkan tren kinerja positif.

Pertumbuhan juga akan didorong oleh kinerja investasi yang meningkat, percepatan vaksinasi Covid-19, pembukaan sektor ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 414 triliun. Anggaran itu naik 28,8% atau Rp 92,8 triliun dibandingkan rencana awal Rp 321,2 triliun. Anggaran PEN tahun depan diarahkan untuk tetap mendukung penanganan pandemi di bidang kesehatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan insentif untuk dunia usaha agar terus bangkit di masa pemulihan ekonomi.

Sementara tingkat inflasi akan tetap terkendali pada 2022 dan terjaga pada

kisaran 2-4%. Tingkat inflasi yang terjadi ini didukung oleh pasokan barang yang tetap memadai, respons kebijakan BI, serta koordinasi yang baik oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah. Indikator lainnya terkait stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap dijaga sesuai dengan komitmen kuat BI di tengah normalisasi kebijakan moneter the Fed, bank sentral di Amerika Serikat.

Kemudian, defisit transaksi berjalan di tahun depan juga diperkirakan stabil sebesar 1,5% terhadap PDB. Cadangan devisa meningkat, stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana pihak ketiga (DPK) dan kredit akan tumbuh masing-masing 7-9% dan 6-8% pada tahun 2022.

Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pesat. Transaksi *digital banking* akan mencapai Rp 40 ribu triliun pada 2021 dan meningkat menjadi Rp 48 ribu triliun pada 2022. Transaksi *e-commerce* di tahun 2021 dapat mencapai Rp 403 triliun dan naik menjadi Rp 530 triliun pada 2022. Begitu pula dengan transaksi uang elektronik yang akan meningkat menjadi Rp 289 triliun di 2021 dan menjadi Rp 337 triliun pada 2022.

Dengan sinergi yang kuat semua *stakeholders*, kita boleh berharap pemulihan ekonomi tinggal menunggu waktu. Apalagi sejumlah indikator memperlihatkan perbaikan bila dibandingkan tahun lalu. Dunia usaha punya prospek yang lebih baik tahun depan. Permintaan kredit akan meningkat untuk membuka usaha baru ataupun ekspansi.

Namun demikian, kita jangan dulu berpuas diri. Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dan menentukan arah pemulihan ekonomi ke depan. Pemulihan ekonomi akan semakin

in terakselerasi jika kasus Covid-19 dapat ditekan. Sebaliknya, bila terjadi lonjakan kasus Covid-19 –seperti saat ini dialami sejumlah negara di Eropa– akan memupus harapan. Pengendalian pandemi Covid-19 yang konsisten diperlukan untuk menjaga prospek pemulihan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Tak hanya itu, yang juga perlu diwaspadai adalah dinamika global yang akan menimbulkan potensi risiko di akhir tahun 2021 sampai 2022. Isu-isu ekonomi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa perlu dicermati. Fluktuasi harga komoditas, disrupsi rantai pasok (*supply-chain disruption*) dan beberapa risiko lain seperti geopolitik dan perubahan iklim patut diwaspadai.

Pandemi Covid-19 telah mendisrupsi rantai pasok global, terjadi kelangkaan kontainer, dan biaya logistik melonjak. Situasi tersebut mengakibatkan jutaan bahkan mungkin miliaran produk tidak dapat bergerak sama sekali, menunggu untuk diangkut, sehingga menciptakan antrean dan *backlog* pesanan yang sangat luar biasa. □

## POJOK IDE

**Presiden: Pola ‘jadul’ pelayanan investasi harus ditinggalkan.**

*Layanan terbaik untuk berbagai skala usaha.*

**FAO minta seluruh negara membuat sistem pertanian pangan yang tangguh.**

*Pendemi membuka tabir kelemahan sistem pertanian dan ketahanan pangan.*

# Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Bisnis Properti

Pemberitaan tentang indikasi gagal bayar utang perusahaan properti raksasa Tiongkok, Evergrande, dan diikuti beberapa perusahaan properti di negeri Tirai Bambu lainnya, cukup menyita perhatian pelaku bisnis dunia dan tidak terkecuali di Indonesia.



Oleh **Trismayarni Elen** \*)

Dunia ekonomi dan bisnis harap-harap cemas menanti kabar selanjutnya dari kasus gagal bayar utang Evergrande yang menembus angka Rp 4.000 triliun tersebut. Bagaimana penyelesaiannya dan dampaknya bagi stabilitas keuangan Tiongkok dan global, mengingat pandemi Covid-19 juga belum terselesaikan.

Di balik kasus Evergrande yang memiliki bisnis utama bidang properti, ada hal menarik yang menjadi perhatian penulis bagi dunia bisnis properti dan konstruksi, terutama di Indonesia. Bagaimana sebenarnya bisnis properti yang begitu tumbuh subur pula di Indonesia?

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan negara sangat ditentukan oleh penyediaan infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan dan bangunan yang menjadi perhatian bisnis konstruksi dan properti.

Bisnis properti di dalam kelompok lapangan usaha menjadi bagian dari bisnis konstruksi. Karena pergerakan bisnis properti dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi usaha konstruksi.

Dalam hal ini penulis tidak membahas terkait gurita bisnis perusahaan raksasa properti Evergrande, tetapi memfokuskan dampak bisnis properti, dari aspek yang lain, yang justru berkaitan dengan keberlanjutan sebuah bisnis dan dampak bagi bumi. Yaitu tingginya kontribusi emisi karbon, termasuk dari bisnis konstruksi-properti.

Pada 22 Juli 2021 lalu Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) dan Asian Development Bank (ADB) menggelar *2021 International Climate Change Conference*, dengan target komitmen untuk mengurangi emisi karbon, dan mencapai negara yang tahan iklim menuju ekonomi rendah karbon, (Kemenkeu, 2021).

Selain itu, pada 18 Oktober 2021, Presiden RI Joko Widodo saat menerima Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau Eropa dan Iklim Frans Timmermans di Istana Merdeka pun mengatakan, “Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat sebagai bagian dari solusi masalah perubahan iklim.” Ditambahkan pula pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa isu perubahan iklim dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari isu *Sustainable Development Goals*. Di mana perlu adanya keseimbangan antara menjaga alam dan melakukan pembangunan, (Setneg, 2021).

Sektor konstruksi secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak terhadap peningkatan emisi karbon (gas rumah kaca). Karena bidang konstruksi banyak menggunakan bahan-bahan seperti semen, baja dan kayu.

### Situasi Dilematis Pemerintah

Dalam hal ini sudah pasti Kemenkeu RI tahu bagaimana kontribusi bisnis konstruksi bagi emisi karbon di Indonesia. Namun di masa pandemi Covid-19 ini, memang sangat dilematis sekali bagaimana mengangkat pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor jasa konstruksi pada kuartal II-2021 tumbuh 4,42%, mengalami pertumbuhan positif pertama kalinya setelah 12 bulan berada di zona merah.

Akan tetapi, kontribusi sektor konstruksi pada pertumbuhan ekonomi nasional berkurang secara tahunan dari 10,56% pada kuartal II-2020 menjadi 10,12% pada kuartal II-2021. Kontribusi sektor konstruksi pada PDB kuartal II-2021 masih di bawah sektor industri pengolahan (19,29%), serta sektor pertanian dan perdagangan yang masing-masing di level 14,27% dan 13,08%.

Masih berdasarkan data BPS, sepanjang kuartal II-2021 sektor properti hanya mencatatkan per-



**Aksi dan tindakan nyata oleh para profesional teknik sipil dan arsitek di bidang konstruksi sangat dibutuhkan untuk mencari bahan-bahan yang ramah lingkungan.**

tumbuhan sebesar 2,82%. Kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode ini mencapai 7,07%.

Upaya pemerintah meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi bisnis properti di masa krisis ekonomi tahun 2020 yakni melalui kebijakan perbankan dengan memberi stimulus bunga kredit yang sangat rendah untuk properti, bahkan terendah sepanjang sejarah Indonesia, agar memberi dampak pada lapangan usaha konstruksi.

Sayangnya, stimulus tersebut belum mampu secara maksimal mengatasi pelambatan pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi ini. Sehingga dampak ekonomi masih terasa di sebagian masyarakat Indonesia termasuk UMKM yang bergantung dari perbaikan ekonomi di sektor konstruksi termasuk properti.

Menurut Ketua Umum BPP

Gapensi Iskandar Z Hartawi pada bulan April 2020, ekonomi dari sektor konstruksi di Indonesia melibatkan setidaknya 82% UMKM yang terdiri atas tukang, peralatan, material dan transportasi, (Supriyatna, 2020).

### Pajak Karbon

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah lainnya melalui Kemenkeu yakni menetapkan pajak karbon yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2022. Apakah akan efektif?

Dalam pembagian biaya yang terkait dengan lingkungan, ada kategori biaya lingkungan karena kegagalan eksternal yang tidak ditanggung perusahaan, tapi ditanggung pihak lain, (IAI, 2015). Faktor inilah yang memungkinkan menjadi tanggung-an pihak lain termasuk pemerintah. Contohnya kebakaran hutan, banjir bandang dan longsor, akibat pembabatan hutan dan bukit.

Jika melihat aktivitas bisnis konstruksi, apakah dengan pajak karbon ini akan menghasilkan angka yang signifikan antara apa yang pemerintah terima dari pajak karbon dengan yang harus ne-

gas rumah kaca/emisi karbon.

Jika menyusuri jalan dari Tangerang ke arah Demak, pemandangan yang dijumpai adalah gundulnya bukit-bukit yang tanahnya dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Dampaknya, banjir bandang tidak terelakkan di beberapa wilayah Demak, seperti yang terjadi pada awal tahun 2020.

Bencana alam banjir yang terjadi di awal tahun 2021 lalu di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan menjadi banjir yang terparah selama ini, juga karena berkurangnya hutan Kalimantan. Hutan selain sebagai paru-paru dunia, juga sebagai wahana penting penyerapan air.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Cikarang hingga Cikampek juga dinilai berandil pada terjadinya banjir besar awal tahun 2021 yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat setempat dan sudah pasti juga menjadi beban pemerintah daerah.

### Peran Profesi Akuntan

Seperti halnya yang dihadapi Kemenkeu, maka akuntan yang berada di perusahaan juga menaruh perhatian lebih dalam hal keberlanjutan usaha dalam *Corporate Sustainability Report* yang mengusung sinergi penyelamatan *Profit, People dan Planet*, dengan *Triple Bottom Accounting*.

Pastinya para akuntan tersebut mengetahui dan memahami bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan konstruksi tempat ia bekerja adalah ada yang berdampak negatif pada *people*, baik di dalam maupun di lingkungan luar perusahaan, serta bagi *planet*, namun tidak berdaya.

Dilema yang dihadapi adalah, mana yang harus didahulukan antara going *concern* atau *sustainability* sebuah usaha? Meskipun, beberapa asosiasi profesi serta akademisi akuntan berusaha semaksimal mungkin menyajikan secara teori dan definisi di buku-buku atau modul sebagai pegangan dan acuan profesi akuntan, serta aturan yang tertuang di Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam situasi seperti itu, tindakan harus tetap dilakukan, tidak bisa menunggu lama untuk menghindari ancaman perubahan iklim, terutama bagi pelaku bisnis konstruksi dan properti. Aksi dan tindakan nyata oleh para profesional teknik sipil dan arsitek di bidang konstruksi sangat dibutuhkan untuk mencari bahan-bahan yang ramah lingkungan.

Selain itu, profesi akuntan (akuntan manajemen dan akuntan publik), yang berinteraksi langsung dengan perusahaan dan pengusaha perlu untuk terus menggiatkan pemahaman pengguna untuk mengejar *profit* tanpa melukai dan merusak dari sisi *people* dan *planet*. Mengingat profesi akuntan juga mengetahui betul isi laporan keuangan yang merupakan muara dari semua aktivitas operasional perusahaan.

Sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam pembangunan tidak sekadar menjadi slogan tanpa tindakan nyata yang berdampak signifikan. Dampak perubahan iklim begitu serius, dan karenanya menjadi bahasan penting dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-26) yang digelar 31 Oktober-12 November 2021 lalu.

\*) *Praktisi dan Akademisi Akuntan, Pemerhati Bisnis dan Keuangan UMKM.*





# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO ( BERAGAMA )

Jl. Hanglekir I No.8, Jakarta Pusat 10270 Telp. (021)7246523, 7210908, Fax. (021) 7252684

Email : feupdm@yahoo.com

Website : www.moestopo.ac.id

## SURAT TUGAS

No:12/ST/DEK/FEB/UPDM/IX/2021

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Semester GASAL dan GENAP Tahun Akademik 2021/2022 dengan ini Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberi tugas kepada :

No	N a m a	Jabatan
1.	Dr. Usmar Ismail, SE., MM.	Dosen
2.	Dr. Hendi Prihanto, SE., M.AK.	Dosen
3.	Dr. Tamrin Lanori, SE., M.Si.	Dosen
4.	Trismayarni Elen, SE., M.Si.	Dosen

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Demikian surat tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 13 September 2021



Universitas Prof. Dr. Moestopo (Bragama)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Plt. Dekan

EX. Sugiyanto, SE., MM. *gi*